

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2010, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pemerintah Indonesia. 2021, *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Quraini, N., Busyairi, M., & Adnan, F. (2022). Evaluasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) Komunal Berbasis Masyarakat Kelurahan Masjid Samarinda Seberang. *Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30872/jtlunmul.v6i1.7231>
- WaliKota Surabaya. 2021, *Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.

WaliKota Surabaya. 2021, *Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.

Widodo, A. S., & Materan, M. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat pembuangan Sementara (TPS) dalam Perspektif UU & Siyasah Syar'iiyyah. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 115–124.
<https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.5>